

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Ghea Triane Lengkong

NPP 30.1241

*Asdaf Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [ghealengkong4@gmail.com](mailto:ghealengkong4@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Eljawati, S.Sos, MM

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** *The granting of rights to the regions in the form of the Regional Autonomy policy opens opportunities for the regions to improve the quality of their respective regions, but in reality the regions still find it difficult to be free from dependence on transfer income. The comparison between Regional Original Income and Transfer Income also gives a fairly unequal picture. Purpose:* This study aims to find out how to analyze the financial performance of the local government in Banggai Regency, then what are the factors that hinder the financial performance of the local government and the government's efforts to improve the financial performance of Banggai Regency. **Method:** Ratio analysis is used as a measurement of financial performance with a qualitative descriptive method in research that uses an inductive approach. The ratio analysis theory used is according to Mahmudi which consists of the ratio of fiscal decentralization, regional independence, effectiveness and efficiency of regional spending. **Results/Findings:** The results obtained from the implementation of this research are that in the implementation of regional financial performance in the implementation of regional financial performance there are indicators that are still lacking, namely the ratio of fiscal decentralization and the ratio of regional independence, while the ratio of the effectiveness of Regional Own Revenue and the efficiency of regional expenditure of Banggai Regency has shown satisfactory results. **Conclusion:** In the implementation of regional financial performance analysis, there are several inhibiting factors that become obstacles in the implementation of regional financial management so that the local government of Banggai Regency also makes efforts to follow up on the inhibiting factors in financial performance in Banggai Regency. The inhibiting factors faced by local governments are the lack of expertise and quantity of human resources, namely in managing regional finances, people who are less obedient in paying taxes and the lack of utilization and development of regional potential in Banggai Regency. The regional government's efforts to deal with these inhibiting factors are by carrying out technical guidance for admins in application-based financial management, conducting socialization or outreach activities to the community regarding the benefits of paying taxes and increasing the management of regional potential in Banggai Regency.

**Keywords:** *Financial Performance, Ratio Analysis, Regional Finance*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pemberian hak kepada daerah dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah membuka kesempatan untuk daerah dalam meningkatkan kualitas daerah masing-masing, namun dalam realitanya daerah masih kesulitan untuk bisa terlepas dari ketergantungan kepada pendapatan transfer. Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan transfer juga memberi gambaran yang cukup timpang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Banggai, kemudian apa saja faktor yang menghambat kinerja keuangan pemerintah daerah serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Banggai. **Metode:** Analisis rasio digunakan sebagai pengukuran kinerja keuangan dengan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian yang menggunakan pendekatan induktif. Teori analisis rasio yang digunakan ialah menurut Mahmudi yang terdiri dari rasio desentralisasi fiskal, kemandirian daerah, efektivitas dan efisiensi belanja daerah. **Hasil/Temuan:** Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini yakni daerah Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan kinerja keuangan daerah terdapat indikator yang masih kurang yakni pada rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian daerah, sedangkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan efisiensi belanja daerah Kabupaten Banggai sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. **Kesimpulan:** Pelaksanaan analisis kinerja keuangan daerah terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah Kabupaten Banggai juga melakukan upaya dalam menindaklanjuti faktor penghambat dalam kinerja keuangan di Kabupaten Banggai. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah adalah kurangnya keahlian dan kuantitas sumber daya manusia yakni pada pengelolaan keuangan daerah, masyarakat yang kurang patuh membayar pajak dan kurangnya pemanfaatan serta pengembangan potensi daerah di Kabupaten Banggai. Adapun upaya pemerintah daerah dalam menghadapi faktor penghambat tersebut yakni dengan melaksanakan bimbingan teknis bagi admin dalam pengelolaan keuangan berbasis aplikasi, melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait manfaat membayar pajak dan meningkatkan kembali pengelolaan potensi daerah yang ada di Kabupaten Banggai.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Analisis Rasio, Keuangan Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awalnya mengeluarkan kebijakan dalam rangka mewujudkan salah satu dari empat tujuan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dengan adanya kebijakan otonomi daerah pada era awal reformasi. Otonomi daerah pada dasarnya tidak hanya untuk memberikan hak kepada daerah namun kebijakan ini juga memberikan kewajiban kepada daerah untuk melindungi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah, sehingga daerah diberikan hak untuk dapat mengelola pemerintahan

secara mandiri namun tetap berkewajiban untuk melaporkan segala macam transaksi yang dilakukan. Otonomi daerah memiliki dua aspek kinerja keuangan yang dituntut dalam pelaksanaannya untuk bisa menjadi lebih baik lagi jika dibandingkan dengan sebelum adanya Otonomi Daerah. Pertama, daerah diberikan kewenangan untuk mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, sisi manajemen pengeluaran di daerah dimana pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan sehingga lebih efisien serta efektif khususnya dalam pengeluaran daerah

Kinerja keuangan di daerah dalam mengelola keuangan daerah perlu memperhatikan terkait prioritas dalam kebutuhan pembangunan di daerah, kondisi daerah, pelaksanaan desentralisasi dan juga dekonsentrasi dalam pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat pada setiap sektor yang ada. Jika memperhatikan kedua aspek tersebut, diharapkan untuk ke depannya kinerja keuangan pemerintah daerah dapat mencapai tujuan atau hasil akhir yang telah ditetapkan demi mewujudkan daerah yang mandiri, maju, transparan dan inovatif. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah untuk menyusun dan merancang Rencana APBD untuk tahun berikutnya dan sebagai bahan evaluasi, apa yang perlu memperoleh perhatian lebih untuk meningkatkan PAD. Kemampuan PAD yakni sebagai kekuatan utama dalam mengurus pembiayaan daerah dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan juga dapat dicapai apabila laporan keuangan daerah disajikan atau bisa diakses oleh masyarakat sebagai pemenuhan kewajiban terkait hak-hak yang bersifat publik dari pemerintah daerah dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Sumber Pendapatan daerah terdiri atas tiga yaitu PAD, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD ialah Pendapatan yang dipungut serta diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer ialah dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah sebagai suatu bentuk dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi atau Otonomi Daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan yang diperoleh daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti dana hibah atau dana darurat. Kontribusi dari PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Banggai selama lima tahun terakhir sangat rendah, paling tinggi yakni berbanding 1:10 maka yang menjadi sumber pendapatan daerah tertinggi bukan dari PAD.

Perbandingan jumlah sumber-sumber pendapatan daerah pada Kabupaten Banggai selama lima tahun terakhir. Tampak bahwa yang berkontribusi terbesar dalam Pendapatan Daerah ialah pada Pendapatan Transfer. Jumlah pendapatan pun berbeda jauh antara Pendapatan Transfer dan PAD sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banggai masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai belum dapat melaksanakan kebijakan terkait otonomi daerah secara optimal, terkhusus pada pengelolaan keuangan daerah.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan atau tolak ukur bagi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Penelitian oleh Nenda Marliani (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2016-2020, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif diperoleh hasil yakni pada indikator kemandirian daerah serta derajat desentralisasi pada Kabupaten Bandung masih kurang sedangkan efektivitas dan efisiensi keuangan di daerah tersebut sudah baik. Penelitian oleh Rizki Sari Eka Putri dan Agus Munandar (2021) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif sehingga dapat diperoleh hasil yakni indikator kemandirian daerah di Kota Malang masih sangat kurang oleh sebab itu Kota Malang dalam kinerja keuangannya masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Penelitian oleh Krisnawati, Muhammad Zulkarnain dan Yuliana (2021) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Timur, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif diperoleh hasil pada efisiensi pembelanjaan daerah sudah baik namun tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan daerah di Kabupaten Aceh Timur masih kurang baik.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang dilakukan penulis tentu memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, di antaranya ialah yang sangat terlihat yakni dari tempat atau daerah yang diteliti oleh penulis. Sebelumnya belum pernah dilaksanakan penelitian terkait analisis kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Banggai. Penelitian ini juga merupakan salah satu penelitian terbaru yang dilakukan di lingkup pemerintahan Kabupaten Banggai yang juga membahas terkait kondisi keuangan pemerintahan. Perbedaan lainnya yakni pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif meskipun terdapat perhitungan dalam melakukan penelitian khususnya pada proses analisis kinerja keuangan. Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif dengan berdasar pada teori menurut Sugiyono (2016:13) bahwa: “Penelitian Kualitatif tidak menolak angka dan penggunaan statistik untuk menyajikan data dan analisis, statistik disini tidak digunakan untuk menguji hipotesis sehingga tidak ada kata signifikan”.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah serta yang menjadi faktor penghambat dalam kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banggai dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai dalam meningkatkan kinerja keuangan di Kabupaten Banggai.

## **II. METODE**

Penulis mengutip pendapat dari Wahyuni dalam Hamdi & Ismaryati (2014:6:16) bahwa “Qualitative researchers tend to analyze their data inductively” yang artinya ialah penelitian

kualitatif cenderung menganalisis datanya secara induktif. Hal tersebut saling berkesinambungan apabila dihubungkan dengan metode pendekatan penelitian kualitatif sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai pendekatan penelitian, sehingga peneliti atau penulis dalam hal ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan juga pendekatan induktif. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dapat menggambarkan atau menguraikan suatu objek permasalahan yang diteliti berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada teori sumber data menurut Sugiyono (2012:193) yakni sumber data dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini yakni informan yang menjadi sumber informasi serta sumber data sekunder yakni dokumen atau data pendukung terkait laporan keuangan khususnya laporan realisasi anggaran pada lingkup pemerintahan Kabupaten Banggai. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pemilihan informan dengan menggunakan sampel yang berhubungan langsung atau mengetahui secara pasti terkait permasalahan yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menurut Sugiyono (2012:334) yakni dengan reduksi data, penyajian data serta verifikasi dan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

Penulis pada bagian ini melakukan analisis terkait Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan Rasio Keuangan menurut Mahmudi yang terdiri dari Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja.

##### 3.1.1. Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah

Desentralisasi Keuangan Daerah ialah bagaimana keadaan keuangan suatu daerah sebagai bentuk adanya kebijakan yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur serta mengelola pemerintahannya sendiri. Rasio Desentralisasi keuangan daerah dapat diketahui dengan membagi antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah. Jumlah pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Banggai tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1**

Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai tahun 2017-2021

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah
2017	186.690.738.617,03	1.855.045.844.098,03
2018	135.426.630.832,28	1.852.008.921.001,28
2019	165.863.778.696,68	1.898.506.690.113,68
2020	157.994.144.272,97	1.959.706.353.744,97
2021	190.462.129.225,83	2.115.804.450.981,83

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021

Data tersebut kemudian digunakan oleh penulis dalam menghitung rasio Desentralisasi Keuangan Daerah sehingga diperoleh hasil yakni pada tahun 2017 sebesar 10,06%, pada tahun 2018 sebesar 7,31%, pada tahun 2019 sebesar 8,73%, tahun 2020 sebesar 8,06% dan pada tahun 2021 sebesar 9,01%. Kontribusi dari PAD dalam jumlah Pendapatan Daerah di Kabupaten Banggai masih sangat kurang selama beberapa tahun terakhir. Kontribusi tertinggi yakni sebanyak 10,06% pada tahun 2017, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya berada di bawah 10% tetapi pada tahun 2021 kontribusi dari PAD cukup meningkat dibandingkan dengan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 yakni sebanyak 9,01%. PAD pada tahun 2021 juga menunjukkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, bahkan pada tahun 2017 yang memiliki hasil persentase kontribusi PAD tertinggi selama lima tahun terakhir mempunyai jumlah yang lebih rendah daripada tahun 2021. Pemerintah daerah Kabupaten Banggai dianggap masih belum dapat melaksanakan kebijakan terkait desentralisasi serta belum mencapai tujuan dari adanya kebijakan tersebut, meskipun setiap tahun Pendapatan Daerah terus meningkat namun jika PAD tidak mencapai persentase yang dominan dalam Pendapatan Daerah maka desentralisasi pada daerah yang bersangkutan masih belum maksimal.

### 3.1.2. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah memberikan gambaran terkait tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Rasio ini dihitung dengan membagi Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Transfer. Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Daerah pada tahun 2017 sebanyak 11,20%, pada tahun 2018 sebanyak 8,10%, tahun 2019 sebanyak 9,86% dan pada tahun 2020 sebanyak 9,21% serta tahun 2021 sebanyak 10,20%. Tingkat kemandirian Kabupaten Banggai masih sangat rendah, hasil dari perhitungan antara jumlah PAD dan pendapatan transfer menunjukkan nilai persentase yang kurang dari 12%, yang terendah mencapai 8,10% pada tahun 2018. Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai masih belum mandiri dalam hal keuangan atau fiskal serta masih bergantung pada dana transfer yang merupakan dana dari pemerintah pusat.

### 3.1.3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas dihitung dengan membagi antara target serta realisasi dari PAD pada suatu daerah. Jumlah target dan realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Banggai pada tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2**

Jumlah Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai pada tahun 2017-2021

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2017	194.566.007.852,00	186.690.738.617,03
2018	164.385.345.232,23	135.426.630.832,28
2019	168.604.086.112,24	165.863.778.696,68
2020	233.408.172.191,83	157.994.144.272,97
2021	233.632.660.542,00	190.462.129.225,83

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021

Efektivitas PAD di Kabupaten Banggai sebagian besar sudah cukup baik selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat mendadak dimana hasil dari rasio efektivitasnya hanya mencapai 67,69% yang menjadi permasalahan yakni pada tahun 2020 terjadi pandemi covid yang membuat negara dan masyarakat perlu melakukan pembatasan sosial sehingga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya sehingga PAD tidak dapat diperoleh secara maksimal. Tahun 2021 pemerintah daerah Kabupaten Banggai dapat meningkatkan kembali kinerja keuangan dalam realisasi PAD sehingga rasio efektivitas yang diperoleh kembali seperti pada tahun-tahun sebelumnya berkisar pada angka 80%.

### 3.1.4. Rasio Efisiensi Belanja

Pemerintah daerah dapat dikatakan sudah melakukan efisiensi pada saat target dan juga realisasi Belanja Daerah memiliki hasil rasio efisiensi kurang dari 100% serta lebih sedikit apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio efisiensi belanja daerah digunakan untuk mengukur tingkat efisien kinerja keuangan Kabupaten Banggai dalam hal ini mengenai target dan realisasi belanja daerah. Jumlah dari target dan realisasi belanja daerah yang ditetapkan dan dicapai di Kabupaten Banggai sebagai berikut.

**Tabel 3**

Jumlah Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021

Tahun	Target Belanja	Realisasi Belanja
2017	1.723.799.852.170,04	1.597.232.147.342,43
2018	1.690.955.167.067,87	1.524.868.788.784,21
2019	1.696.651.594.343,93	1.536.560.255.493,14
2020	1.648.304.859.622,03	1.470.614.241.674,00
2021	2.141.345.435.656,00	2.009.070.705.713,73

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021

Berdasarkan data yang diperoleh di atas maka dapat dilakukan perhitungan rasio efisiensi belanja daerah sehingga diperoleh hasil pada tahun 2017 sebesar 92,66%, tahun 2018 90,18%, tahun 2019 90,56%, tahun 2020 89,22% dan pada tahun 2021 sebesar 93,82%. Hasil perhitungan rasio menunjukkan selama lima tahun berturut-turut efisiensi belanja daerah Kabupaten Banggai dominan mencapai 90% serta dianggap cukup konsisten pada kisaran tersebut. Capaian tersebut menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Banggai dalam menetapkan dan merealisasikan belanja daerah sudah cukup baik.

### 3.2. Faktor Penghambat dalam Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Banggai

Kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Banggai dalam pelaksanaannya tentu mendapati berbagai permasalahan yang memberi hambatan dalam prosesnya. Faktor penghambat dalam kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Banggai ialah sumber daya manusia pada pemerintahan di Kabupaten Banggai masih kurang baik kuantitas dan keahlian pekerja khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya yakni kurangnya pemanfaatan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Banggai. Faktor penghambat yang

terakhir yakni kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih kurang sehingga pemerintah masih perlu untuk membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat terkait pembayaran pajak. Faktor penghambat yang telah disebutkan diperoleh peneliti berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan peneliti melalui kegiatan observasi sehingga peneliti kemudian menyimpulkan tiga faktor penghambat dalam kinerja keuangan daerah di Kabupaten Banggai.

### **3.3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Kabupaten Banggai**

Pelaksanaan pemerintahan setiap tahunnya melewati tahap evaluasi dari hasil yang diperoleh selama satu tahun berjalan. Hasil yang didapatkan dalam masa pemerintahan selama satu tahun berjalan akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai dalam meningkatkan kinerja keuangannya baik dalam memaksimalkan realisasi dari target yang ditetapkan, meningkatkan PAD serta dalam merealisasikan belanja seminimal mungkin sebagai upaya penghematan anggaran. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Banggai dalam hal meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah yakni melaksanakan bimbingan teknis bagi pegawai yang menjadi admin dalam pengelolaan keuangan daerah, selanjutnya melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga mendapatkan pemahaman terkait pembayaran dan manfaat membayar pajak untuk pengembangan daerah. Upaya yang terakhir yakni dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Banggai sebagai potensi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

### **3.4. Diskusi Temuan Utama**

Hasil dari penelitian ini yakni dalam pelaksanaan kinerja keuangan daerah terdapat indikator yang masih sangat kurang yakni pada rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian daerah, sedangkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan efisiensi belanja daerah Kabupaten Banggai sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada penelitian terdahulu yakni pada penelitian oleh Krisniawati diperoleh hasil rasio efektivitas yang masih rendah, sedangkan dalam penelitian ini rasio efektivitas PAD sudah sangat baik. Selain itu, hasil dari penelitian ini tidak hanya pada rasio keuangan daerah saja seperti pada penelitian terdahulu yang merupakan acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang merupakan hasil dari penelitian juga ialah faktor penghambat serta upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Banggai

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Pada rasio efektivitas dan efisiensi daerah Kabupaten Banggai yang sudah baik, peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan di Kabupaten Banggai. Peningkatan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai yakni dalam meningkatkan PAD, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai meluncurkan inovasi 'BAPANTAU ASN'



yakni melalui aplikasi ini dapat diketahui ASN yang belum membayar pajak tepat waktu, jika ASN yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan saja tidak membayar pajak tepat waktu maka bagaimana pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk dapat membayar dengan tepat waktu.

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan ialah rangkuman dari keseluruhan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Kesimpulan pada penelitian ini yakni terkait kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banggai melalui analisis rasio menggunakan teori Mahmudi, yakni: Hasil desentralisasi fiskal Kabupaten Banggai masih kurang sehingga pemerintah daerah Kabupaten Banggai dianggap belum melaksanakan kebijakan terkait desentralisasi dengan baik. Kemandirian daerah di Kabupaten Banggai juga masih kurang serta masih bergantung pada pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat. Efektivitas PAD Kabupaten Banggai sudah baik dalam merealisasikan target PAD yang ditetapkan. Efisiensi dari belanja daerah juga sudah cukup baik terutama pada penghematan anggaran. Faktor penghambat ialah hal-hal yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam hal ini terkait kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Banggai. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah di Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan kinerja keuangan yakni kurangnya kuantitas serta keahlian sumber daya manusia di Kabupaten Banggai terutama idalam proses pengelolaan keuangan daerah, tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah dalam pembayaran pajak dan pemanfaatan potensi daerah yang masih kurang. Upaya ialah respon atau timbal balik yang muncul dari satu pihak terkait penyelesaian permasalahan yang harus dihadapi. Upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengenai kinerja keuangan di Kabupaten Banggai yakni melaksanakan kegiatan bimbingan teknis bagi pekerja yang bertugas sebagai admin pada aplikasi pengelolaan keuangan daerah, yang selanjutnya ialah melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada rakyat di Kabupaten Banggai mengenai manfaat dalam membayar pajak dan meningkatkan pengelolaan potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Banggai.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian serta kemampuan dari peneliti dalam memperoleh informasi yang lebih mendetail akibat dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki peneliti

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan secara lebih mendetail terkait dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik dari pihak civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri maupun pihak luar IPDN yakni pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan

penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah turut membantu serta memberikan dorongan dalam penyelesaian penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Hamdi, M., & Ismaryati, S. (2014). *Metodologi Penelitian Administrasi*, Edisi 2. In Banten: Universitas Terbuka.

Krisnawati, Zulkarnain, M., & Yuliana. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Timur*. IHTIYATH Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 5(1), 1–13.

Marliani, N. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020*. JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi), 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>

Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020*. JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 5(3), 2296–2313.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. IKAPI.

